



Scripta Humanika: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan

Vol. 2 No. 1 August 2026, Hal 57-68

ISSN: 3110-892X (Print) ISSN: 3110-8911 (Electronic)

Open Access: <https://scriptaintelektual.com/scripta-humanika/index>

Bahasa Kritik sebagai Simbol Kekuasaan: Analisis Wacana Politik Dino Patti Djalal dengan Teori Semiotika Susanne Langer

Indah Gita Cahyani^{1*}, David Wicaksono², Moh. Dey Prayogo³

¹⁻³ Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

email: gita Cahyani289@gmail.com¹

Article Info :

Received:

21-06-2026

Revised:

03-07-2026

Accepted:

08-07-2026

Abstract

Public debate over President Prabowo Subianto's intensive overseas visits prompted criticism from Dino Patti Djalal that combined rational arguments with symbolic meanings. This study aims to analyze Dino Patti Djalal's critical language as a symbol of power using Susanne Langer's semiotic theory. A descriptive qualitative method with a semiotic approach was employed to examine four statements published on X/Twitter and reported by national media during May–June 2026. The data were analyzed through discursive and presentational symbols. The findings reveal that discursive symbols are reflected in empirical data, arguments on budget efficiency, diplomatic strategies, and the distribution of authority, while presentational symbols construct perceptions of accountability, leadership, efficiency, and political legitimacy. The study concludes that political language functions not only as a means of conveying information but also as a symbolic system that shapes public meaning through the integration of rationality and symbolic experience.

Keywords: Critical Language, Discursive Symbols, Presentational Symbols, Power, Susanne Langer's Semiotics.

Akstrak

Perdebatan mengenai intensitas lawatan luar negeri Presiden Prabowo Subianto memunculkan kritik dari Dino Patti Djalal yang memadukan argumentasi rasional dan muatan simbolik. Penelitian ini bertujuan menganalisis bahasa kritik Dino Patti Djalal sebagai simbol kekuasaan menggunakan teori semiotika Susanne Langer. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan semiotika terhadap empat ujaran yang dipublikasikan melalui akun X/Twitter dan dikutip media nasional pada Mei–Juni 2026. Data dianalisis berdasarkan simbol diskursif dan simbol presentasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa simbol diskursif dibangun melalui data empiris, argumentasi efisiensi anggaran, strategi diplomasi, dan distribusi kewenangan, sedangkan simbol presentasional membentuk persepsi mengenai akuntabilitas, kepemimpinan, efisiensi, dan legitimasi kekuasaan. Temuan ini menegaskan bahwa bahasa politik tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mengonstruksi makna dan persepsi publik melalui perpaduan antara nalar dan pengalaman simbolik.

Kata Kunci: Bahasa Kritik, Kekuasaan, Semiotika Susanne Langer, Simbol Diskursif, Simbol Presentasional.



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Perkembangan politik global yang semakin kompleks telah mendorong diplomasi presidensial menjadi salah satu instrumen utama dalam membangun posisi strategis suatu negara di tengah perubahan tatanan internasional yang bersifat multipolar. Pergeseran orientasi politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Prabowo menunjukkan kecenderungan menuju strategic assertiveness, yaitu pendekatan yang menempatkan diplomasi aktif, kerja sama pertahanan, serta penguatan hubungan bilateral dan multilateral sebagai prioritas kebijakan luar negeri (Setiawan, 2025). Intensitas lawatan luar negeri kepala negara dalam konteks tersebut tidak lagi dipahami sebagai aktivitas seremonial semata, melainkan sebagai representasi arah kebijakan, strategi negosiasi, serta konstruksi kepemimpinan politik dalam ruang internasional (Post, 2026). Pemberitaan mengenai tingginya frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo hingga pertengahan tahun 2026 kemudian memunculkan perhatian publik karena dianggap mencerminkan gaya diplomasi yang berbeda dibandingkan pemerintahan sebelumnya (Abdurahman, 2026). Perbedaan penafsiran terhadap fenomena tersebut menunjukkan bahwa praktik politik modern tidak pernah terlepas dari proses

produksi makna melalui bahasa yang digunakan oleh aktor-aktor politik. Bahasa politik pada akhirnya berfungsi bukan hanya sebagai medium komunikasi, tetapi juga sebagai perangkat simbolik yang membentuk persepsi publik mengenai legitimasi, efektivitas, serta orientasi kekuasaan suatu pemerintahan.

Kajian mengenai hubungan antara bahasa, kekuasaan, dan ideologi telah berkembang secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir dengan menunjukkan bahwa wacana politik selalu bekerja melalui mekanisme representasi yang membangun realitas sosial tertentu (Aminuddin et al., 2025). Penelitian lain memperlihatkan bahwa produksi makna dalam pemberitaan politik tidak sekadar merefleksikan fakta, melainkan juga mengonstruksi legitimasi melalui proses framing, pemilihan diksi, serta strategi retorika yang memengaruhi cara publik memahami suatu kebijakan (Annur et al., 2025). Kajian mengenai tanda-tanda politik juga menegaskan bahwa simbol politik memiliki fungsi yang jauh melampaui penyampaian informasi karena setiap ujaran mengandung relasi antara identitas, kepentingan, serta orientasi kekuasaan yang dinegosiasikan melalui bahasa (Aulia & Sakinah, 2025). Penelitian mengenai kekerasan simbolik terhadap politisi perempuan di media sosial semakin memperkuat pandangan bahwa bahasa mampu bekerja sebagai instrumen dominasi maupun resistensi dalam ruang publik digital (Eliya et al., 2026). Temuan-temuan tersebut memperlihatkan adanya kecenderungan bahwa analisis komunikasi politik semakin bergeser dari pembacaan linguistik menuju pembacaan simbolik yang menempatkan bahasa sebagai arena pertarungan makna. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada pidato resmi, pemberitaan media, maupun komunikasi institusional sehingga kritik politik yang berkembang melalui ruang publik belum memperoleh perhatian yang memadai sebagai praktik simbolik yang membentuk persepsi masyarakat terhadap kekuasaan.

Perdebatan mengenai intensitas lawatan luar negeri Presiden Prabowo menjadi contoh nyata bagaimana bahasa politik berfungsi sebagai arena negosiasi legitimasi antara aktor pemerintah dan kelompok kritis di ruang publik. Kritik yang disampaikan Dino Patti Djalal mengenai frekuensi perjalanan luar negeri Presiden menekankan pentingnya efisiensi, akuntabilitas, serta keseimbangan antara diplomasi internasional dan penyelesaian persoalan domestik melalui gagasan formula "1 plus 8" yang dinilai lebih efektif dibandingkan kunjungan bilateral yang terpisah-pisah (Post, 2026). Respons pemerintah melalui Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya justru membingkai lawatan tersebut sebagai investasi diplomatik yang menghasilkan manfaat strategis, termasuk penguatan posisi Indonesia di forum internasional, peningkatan investasi, serta perluasan kerja sama ekonomi dan pertahanan (Mawangi, 2026). Pertentangan dua narasi tersebut menunjukkan bahwa yang diperebutkan bukan semata-mata penilaian atas kebijakan luar negeri, melainkan juga makna mengenai efektivitas kepemimpinan, legitimasi kekuasaan, dan citra pemerintah di hadapan publik (Gautama, 2026). Kajian linguistik politik menjelaskan bahwa bahasa selalu menjadi instrumen produksi kekuasaan karena setiap pilihan kata, metafora, maupun strategi argumentasi berpotensi mengarahkan interpretasi masyarakat terhadap realitas politik tertentu (Kasman et al., 2026). Fenomena ini memperlihatkan adanya kebutuhan untuk membaca kritik politik tidak hanya sebagai opini individual, melainkan sebagai sistem simbol yang membentuk cara masyarakat memahami relasi antara kekuasaan, akuntabilitas, dan demokrasi.

Meskipun kajian mengenai bahasa politik dan analisis wacana kritis telah berkembang pesat, sebagian besar penelitian masih menempatkan bahasa sebagai instrumen ideologi, dominasi, maupun legitimasi tanpa menguraikan bagaimana makna simbolik dibentuk melalui pengalaman dan struktur simbol yang melampaui fungsi representasional bahasa (Kurniawati et al., 2022). Penelitian mengenai bahasa dan kekuasaan lebih banyak menggunakan perspektif Fairclough, Ruth Wodak, maupun pendekatan historis sehingga dimensi simbolik yang dikembangkan oleh Susanne Langer relatif masih jarang diterapkan dalam kajian komunikasi politik Indonesia (Siahaan et al., 2023). Kajian mengenai praktik kekuasaan dalam pidato politik maupun narasi keberlanjutan juga menunjukkan kecenderungan serupa karena fokus analisis diarahkan pada ideologi, relasi kuasa, dan strategi retorika tanpa mengungkap bagaimana simbol membangun pengalaman politik yang dihayati publik (Harmoko & Purwaningrum, 2025). Penelitian mengenai praktik kekuasaan dalam pidato tokoh politik Indonesia pun masih menitikberatkan pada relasi dominasi dan kepentingan politik dibandingkan pembentukan makna simbolik yang bekerja melalui struktur bahasa (Sitorus et al., 2025). Padahal, kritik politik yang disampaikan Dino Patti Djalal memperlihatkan bahwa setiap pilihan kata, metafora, serta argumentasi rasional tidak hanya mengandung informasi faktual, tetapi juga merepresentasikan simbol mengenai

efisiensi, tanggung jawab, kewajaran penggunaan kekuasaan, serta orientasi kepemimpinan. Kesenjangan tersebut menunjukkan perlunya pendekatan semiotika simbolik yang mampu menjelaskan bagaimana bahasa kritik bekerja sebagai konstruksi makna yang membentuk persepsi publik terhadap praktik kekuasaan.

Perspektif semiotika Susanne Langer menawarkan kerangka konseptual yang relevan untuk menjelaskan bahwa bahasa politik merupakan sistem simbol yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun pengalaman, orientasi berpikir, serta struktur makna yang memengaruhi cara masyarakat memahami realitas politik (Langer, 1942). Dalam pandangan Langer, simbol diskursif bekerja melalui susunan logis, hubungan antarkonsep, serta argumentasi yang dapat dianalisis secara rasional sehingga sangat sesuai untuk membaca konstruksi kritik politik yang disampaikan secara sistematis (Langer, 1953). Pada saat yang sama, ujaran politik juga mengandung simbol presentasional yang menghadirkan kesan emosional mengenai kepemimpinan, legitimasi, kewibawaan, maupun tanggung jawab negara sehingga maknanya tidak berhenti pada aspek linguistik semata (Rozak Riaji et al., 2026). Pendekatan tersebut memungkinkan kritik Dino Patti Djalal dipahami bukan sekadar sebagai penilaian terhadap frekuensi lawatan luar negeri Presiden, melainkan sebagai representasi simbolik mengenai relasi antara efisiensi, akuntabilitas, kepentingan nasional, dan penggunaan kekuasaan dalam demokrasi kontemporer. Pemahaman tersebut juga sejalan dengan pandangan bahwa bahasa politik selalu berfungsi sebagai instrumen pembentukan realitas sosial karena setiap simbol yang diproduksi akan memengaruhi cara publik memaknai kebijakan maupun aktor politik (Sukrin, 2025). Pembacaan melalui semiotika Langer sekaligus membuka ruang analisis yang lebih luas terhadap pertarungan simbol antara kritik politik dan narasi resmi pemerintah yang selama ini lebih banyak dijelaskan melalui perspektif analisis wacana kritis.

Berdasarkan berbagai perkembangan tersebut, penelitian ini memosisikan kritik Dino Patti Djalal terhadap intensitas lawatan luar negeri Presiden Prabowo sebagai teks politik yang memuat pertarungan simbol mengenai kekuasaan, legitimasi, efisiensi, dan kepentingan nasional. Penelitian ini tidak hanya berupaya mengidentifikasi makna eksplisit yang terkandung dalam bahasa kritik, tetapi juga menafsirkan struktur simbolik yang membangun pengalaman politik di balik pilihan kata, argumentasi, dan narasi yang digunakan. Posisi penelitian ini berada pada persimpangan antara kajian semiotika, komunikasi politik, dan analisis wacana dengan menghadirkan teori Susanne Langer sebagai perspektif utama untuk membaca bahasa politik sebagai sistem simbol yang kompleks. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memperluas pengembangan kajian semiotika politik yang selama ini masih didominasi oleh analisis tanda dan representasi, menuju pembacaan mengenai pembentukan pengalaman simbolik dalam komunikasi kekuasaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis bahasa kritik Dino Patti Djalal sebagai simbol kekuasaan melalui teori semiotika Susanne Langer, sekaligus menjelaskan bagaimana simbol diskursif dan simbol presentasional bekerja dalam membentuk makna politik di ruang publik. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan studi semiotika politik serta memperkaya pendekatan metodologis dalam analisis komunikasi politik Indonesia melalui pembacaan simbolik yang lebih komprehensif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif karena menggunakan data aktual berupa ujaran politik yang diproduksi dalam konteks komunikasi publik dan dianalisis berdasarkan kerangka semiotika Susanne Langer. Desain penelitian diarahkan untuk mengungkap makna simbolik yang terkandung dalam kritik Dino Patti Djalal terhadap intensitas lawatan luar negeri Presiden Prabowo Subianto melalui identifikasi simbol diskursif dan simbol presentasional sebagaimana dikemukakan oleh Susanne Langer. Data primer berupa unggahan Dino Patti Djalal pada akun X/Twitter pribadinya serta kutipan pernyataannya dalam pemberitaan nasional pada periode akhir Mei hingga 10 Juni 2026, sedangkan data sekunder diperoleh dari media daring nasional, antara lain Antara, Kompas, Tempo, Detik, RRI, The Jakarta Post, dan Jawa Pos yang memuat kritik maupun respons pemerintah terhadap isu tersebut. Pemilihan data dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu hanya memilih ujaran yang secara eksplisit membahas frekuensi kunjungan luar negeri Presiden, efisiensi diplomasi, akuntabilitas anggaran, serta respons resmi pemerintah sehingga relevan dengan tujuan penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan menghimpun, menginventarisasi, dan mengklasifikasikan dokumen teks berdasarkan tema simbolik yang muncul dalam korpus penelitian. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti

memahami bahasa politik sebagai praktik simbolik yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun makna, legitimasi, dan relasi kekuasaan dalam ruang publik (Langer, 1942).

Instrumen utama penelitian ini adalah peneliti (human instrument) yang dibantu dengan lembar klasifikasi data untuk mengidentifikasi simbol diskursif dan simbol presentasional berdasarkan konsep semiotika Susanne Langer. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan kutipan ujaran Dino Patti Djalal pada sedikitnya tiga media nasional yang berbeda, serta melakukan ketekunan pengamatan melalui pembacaan berulang terhadap seluruh korpus agar konsistensi makna simbolik dapat dipertahankan. Analisis data dilakukan secara bertahap melalui reduksi data, pengodean berdasarkan kategori simbol diskursif dan simbol presentasional, interpretasi makna simbolik dalam konteks komunikasi politik Indonesia, kemudian penyajian hasil dalam bentuk tabel analisis dan uraian deskriptif yang sistematis. Kerangka interpretasi difokuskan pada bagaimana bahasa kritik membentuk representasi efisiensi, akuntabilitas, legitimasi, dan relasi kekuasaan melalui struktur simbol yang bekerja secara logis maupun emosional sebagaimana dijelaskan dalam teori Susanne Langer (Langer, 1953). Pertimbangan etika penelitian diterapkan dengan menggunakan seluruh data yang telah dipublikasikan secara terbuka, menjaga keutuhan isi kutipan tanpa mengubah konteks pernyataan, serta mencantumkan sumber pemberitaan dan referensi akademik secara proporsional sesuai kaidah ilmiah. Melalui prosedur tersebut, penelitian diharapkan menghasilkan analisis yang kredibel, dapat dipertanggungjawabkan, serta memiliki validitas interpretatif dalam menjelaskan bahasa kritik sebagai simbol kekuasaan dalam komunikasi politik kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perdebatan mengenai intensitas lawatan luar negeri Presiden Prabowo Subianto tidak hanya menghadirkan perbedaan pandangan mengenai efektivitas diplomasi, tetapi juga menunjukkan bagaimana bahasa politik digunakan untuk membangun dan menggugat legitimasi kekuasaan. Dalam perspektif semiotika Susanne Langer, setiap ujaran politik dipahami sebagai simbol yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk pengalaman dan makna sosial melalui proses interpretasi (Langer, 1942; Langer, 1953). Oleh karena itu, kritik politik tidak dapat dipahami semata-mata sebagai penyampaian pendapat, melainkan sebagai proses simbolisasi yang memadukan argumentasi rasional dan pengalaman simbolik. Penelitian ini menggunakan konsep simbol diskursif dan simbol presentasional sebagai kerangka analisis untuk mengungkap makna yang terkandung dalam bahasa kritik Dino Patti Djalal. Kedua bentuk simbol tersebut dipandang bekerja secara simultan sehingga setiap ujaran dianalisis sebagai satu kesatuan makna, bukan sebagai unsur yang berdiri sendiri. Dengan pendekatan tersebut, penelitian diarahkan untuk menjelaskan bagaimana bahasa kritik membentuk representasi mengenai kekuasaan, efisiensi, dan kepemimpinan dalam ruang publik.

Berdasarkan proses reduksi data, penelitian ini menetapkan empat ujaran Dino Patti Djalal yang dipublikasikan melalui akun X/Twitter dan dikutip oleh berbagai media nasional pada 30–31 Mei 2026 sebagai korpus utama analisis, sebagai berikut:

“Kunjungan kepala negara ke luar negeri memakan biaya yang besar dan bahkan sangat besar. Satu perjalanan ke luar negeri bisa keluar puluhan, bahkan ratusan miliar.”

“Sejak dilantik Oktober 2024 hingga 30 Mei 2026, Presiden Prabowo telah melakukan 49 kali kunjungan ke luar negeri. Total 95 hari atau sekitar satu dari enam hari masa kepresidenan dihabiskan untuk perjalanan luar negeri.”

“Saya mengusulkan formula 1 plus 8, Presiden dapat melakukan pertemuan dengan kepala negara lain sembari menyampaikan pidato di forum internasional, paling tidak dengan delapan kepala negara lain yang juga hadir.”

“Tidak semua agenda diplomasi harus dihadiri langsung oleh presiden. Pertemuan teknis atau seremonial dapat didelegasikan sepenuhnya kepada Menteri Luar Negeri beserta jajaran diplomat karier.”

Masing-masing ujaran dipilih karena memuat argumentasi yang merepresentasikan kritik terhadap praktik diplomasi sekaligus menghadirkan simbol mengenai efisiensi, akuntabilitas, dan

distribusi kewenangan dalam pemerintahan. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi simbol diskursif, simbol presentasional, serta makna simbol kekuasaan yang dibentuk melalui keterkaitan keduanya dalam setiap ujaran. Dengan demikian, pembahasan berikut disusun berdasarkan empat unit data utama agar proses pembentukan makna simbolik dapat dipahami secara utuh. Pendekatan ini memungkinkan setiap ujaran dibaca sebagai teks politik yang tidak hanya menyampaikan kritik, tetapi juga mengonstruksi persepsi publik mengenai praktik kekuasaan.

Ujaran 1 tentang Biaya Lawatan Luar Negeri sebagai Simbol Efisiensi Fiskal

“Kunjungan kepala negara ke luar negeri memakan biaya yang besar dan bahkan sangat besar. Satu perjalanan ke luar negeri bisa keluar puluhan, bahkan ratusan miliar.”

Sebagai langkah awal analisis, penelitian ini mengkaji ujaran pertama Dino Patti Djalal yang menyoroti besarnya biaya perjalanan luar negeri Presiden. Ujaran tersebut dipilih karena secara eksplisit memuat kritik terhadap penggunaan anggaran negara dalam aktivitas diplomasi internasional sekaligus menjadi pintu masuk bagi pembentukan simbol mengenai efisiensi pemerintahan. Dalam perspektif Susanne Langer, sebuah ujaran politik dipahami sebagai satu kesatuan simbol yang memadukan dimensi rasional dan pengalaman simbolik sehingga makna tidak hanya muncul dari isi pernyataan, tetapi juga dari cara bahasa membangun persepsi publik (Langer, 1942). Oleh karena itu, analisis terhadap ujaran ini dilakukan dengan mengidentifikasi simbol diskursif dan simbol presentasional secara bersamaan agar hubungan keduanya dapat dipahami secara utuh. Pendekatan tersebut memungkinkan penafsiran tidak berhenti pada kritik mengenai besarnya biaya perjalanan, tetapi juga menjelaskan bagaimana bahasa membangun citra mengenai kekuasaan dan tanggung jawab negara. Hasil identifikasi simbol pada ujaran pertama disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Analisis Simbol pada Ujaran Pertama Dino Patti Djalal

Aspek Analisis	Hasil
Simbol Diskursif	Biaya perjalanan, puluhan miliar, ratusan miliar, efisiensi anggaran.
Makna Simbol Diskursif	Kritik dibangun melalui argumentasi ekonomi yang menempatkan efisiensi fiskal sebagai dasar evaluasi terhadap kebijakan diplomasi.
Simbol Presentasional	Kesan pemborosan, beban negara, tanggung jawab penggunaan uang publik.
Makna Simbol Presentasional	Membangun pengalaman simbolik mengenai pentingnya akuntabilitas pemerintah dalam mengelola sumber daya negara.

Berdasarkan Tabel 1, simbol diskursif pada ujaran pertama tampak melalui penggunaan istilah *biaya*, *puluhan miliar*, dan *ratusan miliar* yang membentuk struktur argumentasi mengenai konsekuensi ekonomi dari setiap perjalanan luar negeri Presiden. Pilihan diksi tersebut menunjukkan bahwa kritik Dino Patti Djalal disusun berdasarkan logika hubungan sebab-akibat, yakni semakin tinggi intensitas perjalanan luar negeri maka semakin besar pula anggaran yang harus dikeluarkan negara. Menurut Susanne Langer, simbol diskursif bekerja melalui bahasa yang tersusun secara linear sehingga setiap konsep memiliki hubungan rasional dengan konsep lainnya (Langer, 1942). Dalam konteks ini, besarnya biaya perjalanan dijadikan premis utama untuk mempertanyakan efektivitas pelaksanaan diplomasi luar negeri. Bahasa yang digunakan tidak menonjolkan serangan terhadap pribadi Presiden, tetapi mengarahkan perhatian pada aspek efisiensi penggunaan anggaran negara. Dengan demikian, simbol diskursif yang dibangun dalam ujaran ini merepresentasikan kritik berbasis rasionalitas fiskal sebagai dasar penilaian terhadap praktik kekuasaan.

Selain mengandung simbol diskursif, ujaran pertama juga menghadirkan simbol presentasional yang membangun pengalaman simbolik mengenai hubungan antara kekuasaan dan tanggung jawab publik. Frasa *"sangat besar"* serta penyebutan nominal hingga *"ratusan miliar"* tidak hanya berfungsi menjelaskan besarnya biaya perjalanan, tetapi juga menghadirkan kesan psikologis mengenai beban yang harus ditanggung negara. Dalam teori Susanne Langer, simbol presentasional bekerja secara simultan melalui keseluruhan bentuk ekspresi sehingga makna diterima sebagai pengalaman yang utuh,

bukan sekadar hasil penalaran logis (Langer, 1953). Pilihan bahasa tersebut mendorong masyarakat membayangkan besarnya pengeluaran negara dan menghubungkannya dengan tuntutan agar setiap kebijakan diplomasi memberikan manfaat yang sepadan. Akibatnya, publik tidak hanya memahami informasi mengenai biaya perjalanan, tetapi juga merasakan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam penggunaan keuangan negara. Simbol presentasional pada ujaran ini kemudian membentuk citra bahwa kekuasaan ideal adalah kekuasaan yang menggunakan sumber daya publik secara efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hubungan antara simbol diskursif dan simbol presentasional menunjukkan bahwa kritik Dino Patti Djalal tidak berhenti pada penyampaian data mengenai biaya perjalanan luar negeri, tetapi berkembang menjadi simbol mengenai standar moral dalam penggunaan kekuasaan. Simbol diskursif memberikan landasan rasional melalui argumentasi ekonomi, sedangkan simbol presentasional memperkuat daya persuasi dengan membangun pengalaman kolektif mengenai pentingnya akuntabilitas fiskal. Perpaduan kedua bentuk simbol tersebut memperlihatkan bahwa bahasa kritik digunakan untuk mengonstruksi persepsi bahwa legitimasi pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh kewenangan politik, tetapi juga oleh kemampuan mengelola anggaran secara bertanggung jawab. Temuan ini sejalan dengan pandangan Langer bahwa simbol merupakan sarana utama manusia dalam membentuk makna sosial melalui perpaduan antara logika dan pengalaman simbolik (Langer, 1942; 1953). Dengan demikian, ujaran pertama Dino Patti Djalal tidak hanya merepresentasikan kritik terhadap biaya lawatan luar negeri, tetapi juga menghasilkan simbol mengenai efisiensi fiskal sebagai salah satu ukuran legitimasi kekuasaan dalam pemerintahan demokratis. Analisis terhadap ujaran berikutnya akan memperlihatkan bagaimana strategi simbolik yang sama digunakan untuk membangun persepsi mengenai prioritas kepemimpinan melalui penyajian data frekuensi lawatan Presiden.

Ujaran 2 tentang Frekuensi Lawatan sebagai Simbol Prioritas Kepemimpinan

“Sejak dilantik Oktober 2024 hingga 30 Mei 2026, Presiden Prabowo telah melakukan 49 kali kunjungan ke luar negeri. Total 95 hari atau sekitar satu dari enam hari masa kepresidenan dihabiskan untuk perjalanan luar negeri.”

Ujaran kedua Dino Patti Djalal memusatkan perhatian pada intensitas lawatan luar negeri Presiden Prabowo Subianto melalui penyajian data mengenai jumlah kunjungan dan durasi perjalanan selama masa pemerintahan. Berbeda dengan ujaran pertama yang menekankan aspek pembiayaan, ujaran ini mengarahkan kritik pada persoalan alokasi waktu dan prioritas kepemimpinan dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Dalam perspektif semiotika Susanne Langer, penyajian data empiris tidak hanya berfungsi sebagai informasi faktual, tetapi juga dapat menjadi simbol yang membentuk cara masyarakat memahami suatu realitas politik (Langer, 1942). Oleh karena itu, analisis terhadap ujaran ini dilakukan dengan mengidentifikasi keterkaitan antara simbol diskursif dan simbol presentasional yang muncul secara bersamaan dalam satu konstruksi bahasa. Hubungan kedua bentuk simbol tersebut memperlihatkan bagaimana data statistik diubah menjadi representasi mengenai praktik kekuasaan. Hasil identifikasi simbol pada ujaran kedua disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Analisis Simbol pada Ujaran Kedua Dino Patti Djalal

Aspek Analisis	Hasil
Simbol Diskursif	49 kali kunjungan, 95 hari, satu dari enam hari masa kepresidenan, data empiris, frekuensi perjalanan.
Makna Simbol Diskursif	Kritik dibangun melalui penyajian fakta kuantitatif untuk mengevaluasi efektivitas penggunaan waktu dalam penyelenggaraan diplomasi negara.
Simbol Presentasional	Citra pemimpin yang lebih sering berada di luar negeri, persepsi mengenai prioritas kepemimpinan, pengalaman simbolik tentang jarak antara pemimpin dan ruang domestik.
Makna Simbol Presentasional	Membentuk persepsi publik mengenai keseimbangan antara diplomasi internasional dan tanggung jawab pemerintahan di dalam negeri.

Berdasarkan Tabel 2, simbol diskursif tampak melalui penggunaan data kuantitatif yang disusun secara sistematis sebagai dasar argumentasi politik. Penyebutan 49 kali kunjungan, 95 hari, dan frasa "satu dari enam hari masa kepresidenan" menunjukkan bahwa kritik tidak dibangun melalui asumsi atau penilaian subjektif, melainkan melalui penyajian fakta yang dapat diverifikasi. Menurut Susanne Langer, simbol diskursif memiliki karakter proposisional karena setiap unsur bahasa saling berkaitan membentuk hubungan logis yang menghasilkan suatu kesimpulan (Langer, 1942). Dalam ujaran ini, angka-angka tersebut berfungsi sebagai premis untuk mempertanyakan efektivitas pengelolaan waktu Presiden dalam menjalankan tugas kenegaraan. Penyusunan argumentasi secara bertahap menjadikan kritik tampak objektif karena didasarkan pada indikator yang dapat dipahami secara rasional oleh masyarakat. Dengan demikian, simbol diskursif pada ujaran kedua membangun makna bahwa intensitas aktivitas diplomasi dapat dijadikan ukuran untuk mengevaluasi prioritas pelaksanaan kepemimpinan nasional.

Di balik penyajian data tersebut, ujaran kedua juga menghadirkan simbol presentasional yang membentuk pengalaman simbolik mengenai keberadaan seorang kepala negara. Frasa "satu dari enam hari masa kepresidenan" memiliki daya simbolik yang lebih kuat dibandingkan sekadar penyebutan 95 hari, karena menghadirkan gambaran konkret mengenai proporsi waktu yang dihabiskan Presiden untuk perjalanan luar negeri. Dalam pandangan Susanne Langer, simbol presentasional bekerja melalui konfigurasi makna secara menyeluruh sehingga penerima pesan menangkap pengalaman tertentu sebelum melakukan penalaran secara logis (Langer, 1953). Pilihan bentuk penyajian tersebut membuat publik lebih mudah membayangkan ritme kepemimpinan yang didominasi aktivitas diplomasi internasional. Akibatnya, perhatian masyarakat tidak lagi hanya tertuju pada angka statistik, tetapi berkembang menjadi persepsi mengenai prioritas kerja seorang Presiden dalam menjalankan amanat pemerintahan. Simbol presentasional pada ujaran ini kemudian membangun citra bahwa keberadaan fisik seorang pemimpin di ruang domestik memiliki nilai simbolik yang sama pentingnya dengan keberhasilannya menjalankan diplomasi internasional.

Keterkaitan antara simbol diskursif dan simbol presentasional memperlihatkan bahwa kritik Dino Patti Djalal dibangun melalui perpaduan antara data empiris dan pengalaman simbolik yang saling menguatkan. Data statistik memberikan legitimasi rasional terhadap kritik, sedangkan pengalaman simbolik mengenai proporsi waktu kepemimpinan memperluas makna kritik ke ranah persepsi publik. Perpaduan tersebut menghasilkan simbol mengenai prioritas kepemimpinan, yaitu bahwa efektivitas seorang kepala negara tidak hanya diukur dari intensitas aktivitas diplomasi, tetapi juga dari kemampuannya menjaga keseimbangan antara kepentingan internasional dan kebutuhan domestik. Dalam kerangka semiotika Susanne Langer, proses tersebut menunjukkan bahwa bahasa politik mampu mentransformasikan fakta menjadi pengalaman simbolik yang membentuk cara masyarakat memaknai kekuasaan (Langer, 1942; 1953). Oleh karena itu, ujaran kedua tidak sekadar menyampaikan informasi mengenai frekuensi lawatan luar negeri, tetapi mengonstruksi simbol mengenai orientasi kepemimpinan yang menjadi dasar penilaian publik terhadap legitimasi pemerintahan. Analisis pada ujaran berikutnya akan memperlihatkan bagaimana bahasa kritik bergeser dari penyampaian evaluasi menuju penyusunan alternatif kebijakan melalui simbol "Formula 1 Plus 8" sebagai representasi diplomasi yang lebih strategis dan efisien.

Ujaran 3 tentang Formula "1 Plus 8" sebagai Simbol Diplomasi Strategis

"Saya mengusulkan formula 1 plus 8, Presiden dapat melakukan pertemuan dengan kepala negara lain sembari menyampaikan pidato di forum internasional, paling tidak dengan delapan kepala negara lain yang juga hadir."

Ujaran ketiga Dino Patti Djalal memperlihatkan perubahan orientasi kritik dari sekadar evaluasi terhadap kebijakan menjadi penyampaian alternatif strategi diplomasi yang dinilai lebih efektif. Berbeda dengan dua ujaran sebelumnya yang menyoroti besarnya biaya dan tingginya frekuensi lawatan luar negeri, ujaran ini menawarkan konsep "Formula 1 Plus 8" sebagai model pelaksanaan diplomasi yang mampu menghasilkan manfaat lebih besar dalam satu perjalanan internasional. Dalam perspektif semiotika Susanne Langer, simbol tidak hanya merepresentasikan objek tertentu, tetapi juga membangun cara berpikir mengenai kemungkinan tindakan yang dapat dilakukan (Langer, 1942). Oleh karena itu, formula yang dikemukakan Dino Patti Djalal tidak dipahami sebagai usulan teknis semata, melainkan sebagai simbol yang merepresentasikan cara pandang terhadap efisiensi diplomasi dalam

praktik pemerintahan. Analisis terhadap ujaran ini dilakukan dengan mengidentifikasi hubungan antara simbol diskursif dan simbol presentasional yang muncul dalam satu konstruksi bahasa politik. Hasil identifikasi simbol pada ujaran ketiga disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Analisis Simbol pada Ujaran Ketiga Dino Patti Djalal

Aspek Analisis	Hasil
Simbol Diskursif	Formula 1 Plus 8, forum internasional, delapan kepala negara, optimalisasi diplomasi, efisiensi pertemuan.
Makna Simbol Diskursif	Kritik diarahkan pada penyusunan solusi melalui strategi diplomasi yang lebih efektif, efisien, dan terintegrasi.
Simbol Presentasional	Citra pemimpin yang strategis, adaptif, visioner, dan mampu memaksimalkan peluang diplomasi internasional.
Makna Simbol Presentasional	Membangun persepsi bahwa efektivitas kepemimpinan ditentukan oleh kualitas strategi, bukan banyaknya perjalanan luar negeri.

Berdasarkan Tabel 3, simbol diskursif pada ujaran ketiga terlihat melalui penggunaan konsep "Formula 1 Plus 8" sebagai bentuk argumentasi yang menawarkan alternatif kebijakan. Berbeda dengan ujaran sebelumnya yang bertumpu pada data empiris, simbol diskursif pada bagian ini diwujudkan melalui penyusunan gagasan yang sistematis mengenai cara meningkatkan efektivitas diplomasi. Menurut Susanne Langer, simbol diskursif memungkinkan manusia menyusun konsep-konsep abstrak ke dalam hubungan logis sehingga dapat dipahami sebagai satu sistem pemikiran (Langer, 1942). Formula tersebut menunjukkan bahwa satu kunjungan internasional dapat dimanfaatkan untuk melakukan berbagai pertemuan bilateral sekaligus, sehingga manfaat diplomasi menjadi lebih optimal tanpa harus menambah frekuensi perjalanan. Dengan demikian, kritik tidak lagi berfokus pada identifikasi persoalan, tetapi berkembang menjadi argumentasi yang menawarkan solusi rasional terhadap pengelolaan diplomasi negara. Simbol diskursif yang dibangun melalui ujaran ini merepresentasikan efisiensi sebagai prinsip utama dalam penyelenggaraan hubungan internasional.

Selain menghadirkan argumentasi yang logis, ujaran ketiga juga membentuk simbol presentasional yang berkaitan dengan citra kepemimpinan strategis. Frasa "Formula 1 Plus 8" memiliki daya simbolik yang kuat karena disampaikan dalam bentuk yang ringkas, mudah diingat, dan mampu menggambarkan strategi diplomasi secara sederhana. Dalam teori Susanne Langer, simbol presentasional bekerja melalui bentuk yang diterima sebagai satu kesatuan pengalaman sehingga makna muncul tidak hanya dari isi bahasa, tetapi juga dari konfigurasi simbol yang digunakan (Langer, 1953). Penggunaan istilah formula menghadirkan kesan bahwa diplomasi dapat dirancang secara terukur, sistematis, dan berorientasi pada hasil. Akibatnya, publik tidak hanya memahami adanya usulan efisiensi, tetapi juga memperoleh gambaran mengenai sosok pemimpin yang mampu memanfaatkan setiap kesempatan diplomatik secara maksimal. Simbol presentasional tersebut membangun pengalaman kolektif bahwa kualitas kepemimpinan tercermin dari kecakapan menyusun strategi, bukan semata-mata dari intensitas kehadiran dalam berbagai forum internasional.

Hubungan antara simbol diskursif dan simbol presentasional menunjukkan bahwa "Formula 1 Plus 8" bukan sekadar slogan komunikasi politik, melainkan simbol yang mengintegrasikan rasionalitas kebijakan dengan pembentukan citra kepemimpinan. Simbol diskursif memberikan dasar logis melalui penyusunan alternatif diplomasi yang efisien, sedangkan simbol presentasional memperkuat daya persuasi dengan menghadirkan gambaran mengenai pemimpin yang visioner, inovatif, dan adaptif terhadap dinamika hubungan internasional. Perpaduan kedua bentuk simbol tersebut menghasilkan makna bahwa legitimasi kepemimpinan tidak hanya diukur dari aktivitas diplomasi yang tinggi, tetapi juga dari kemampuan menghasilkan manfaat maksimal melalui strategi yang tepat. Dalam perspektif Susanne Langer, bahasa politik memiliki kemampuan mentransformasikan gagasan konseptual menjadi pengalaman simbolik yang memengaruhi cara masyarakat memahami realitas sosial (Langer, 1942; 1953). Oleh karena itu, ujaran ketiga tidak hanya menawarkan solusi terhadap persoalan diplomasi, tetapi juga mengonstruksi simbol mengenai kepemimpinan strategis sebagai bentuk ideal pelaksanaan kekuasaan. Pembahasan selanjutnya akan menganalisis ujaran keempat mengenai pendelegasian

agenda diplomasi kepada Menteri Luar Negeri sebagai simbol distribusi kewenangan dalam praktik pemerintahan.

Ujaran 4 tentang Pendelegasian Diplomasi sebagai Simbol Distribusi Kekuasaan

“Tidak semua agenda diplomasi harus dihadiri langsung oleh presiden. Pertemuan teknis atau seremonial dapat didelegasikan sepenuhnya kepada Menteri Luar Negeri beserta jajaran diplomat karier.”

Ujaran keempat Dino Patti Djalal mengalihkan fokus kritik dari persoalan efisiensi anggaran dan strategi diplomasi menuju mekanisme pelaksanaan kewenangan dalam sistem pemerintahan. Pernyataan bahwa tidak semua agenda diplomasi harus dihadiri langsung oleh Presiden menunjukkan bahwa efektivitas hubungan luar negeri juga ditentukan oleh kemampuan negara mendistribusikan tugas kepada institusi yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya. Dalam perspektif semiotika Susanne Langer, simbol berfungsi sebagai sarana untuk mengonstruksi cara manusia memahami suatu konsep yang bersifat abstrak, termasuk konsep mengenai kekuasaan dan organisasi pemerintahan (Langer, 1942). Oleh karena itu, gagasan mengenai pendelegasian tidak hanya dipahami sebagai usulan administratif, tetapi juga sebagai simbol yang merepresentasikan cara kerja kekuasaan dalam sistem demokrasi modern. Analisis terhadap ujaran ini dilakukan dengan mengidentifikasi unsur simbol diskursif dan simbol presentasional yang membentuk makna politik secara terpadu. Hasil identifikasi simbol pada ujaran keempat disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Analisis Simbol pada Ujaran Keempat Dino Patti Djalal

Aspek Analisis	Hasil
Simbol Diskursif	Pendelegasian kewenangan, Menteri Luar Negeri, diplomat karier, pembagian tugas, efektivitas kelembagaan.
Makna Simbol Diskursif	Kritik diarahkan pada pentingnya distribusi kewenangan agar penyelenggaraan diplomasi berlangsung lebih efektif dan efisien.
Simbol Presentasional	Citra kepemimpinan kolektif, profesionalisme birokrasi, kepercayaan terhadap institusi negara.
Makna Simbol Presentasional	Membangun persepsi bahwa kepemimpinan yang efektif diwujudkan melalui kolaborasi kelembagaan, bukan pemusatan seluruh kewenangan pada satu figur.

Berdasarkan Tabel 4, simbol diskursif tampak melalui penggunaan konsep pendelegasian kewenangan sebagai dasar argumentasi dalam penyelenggaraan diplomasi. Ujaran tersebut dibangun secara logis melalui hubungan antara premis bahwa tidak seluruh agenda membutuhkan kehadiran Presiden dengan kesimpulan bahwa sebagian tugas dapat dilaksanakan oleh Menteri Luar Negeri beserta diplomat karier. Menurut Susanne Langer, simbol diskursif memungkinkan suatu gagasan dipahami melalui rangkaian proposisi yang saling berkaitan sehingga menghasilkan struktur pemikiran yang koheren (Langer, 1942). Dalam konteks ini, kritik Dino Patti Djalal tidak mengarah pada pengurangan peran Presiden dalam diplomasi internasional, melainkan pada optimalisasi pembagian fungsi berdasarkan kompetensi kelembagaan. Struktur argumentasi tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas pemerintahan tidak hanya bergantung pada intensitas keterlibatan kepala negara, tetapi juga pada kemampuan institusi menjalankan kewenangan yang telah didistribusikan. Dengan demikian, simbol diskursif pada ujaran keempat membangun makna bahwa distribusi kekuasaan merupakan bagian dari tata kelola pemerintahan yang rasional dan efisien.

Di samping dimensi rasional tersebut, ujaran keempat juga menghadirkan simbol presentasional yang membangun pengalaman mengenai karakter kepemimpinan dalam pemerintahan modern. Penyebutan Menteri Luar Negeri dan diplomat karier menghadirkan citra bahwa pengelolaan hubungan internasional merupakan tanggung jawab kelembagaan yang dijalankan secara profesional, bukan semata-mata bergantung pada figur Presiden. Dalam teori Susanne Langer, simbol presentasional bekerja melalui pembentukan pengalaman menyeluruh sehingga suatu bentuk mampu menghadirkan kesan tertentu tanpa harus dijelaskan secara eksplisit (Langer, 1953). Melalui pilihan bahasa tersebut,

publik diarahkan untuk membayangkan model pemerintahan yang bertumpu pada kerja sama antarlembaga, profesionalisme aparatur, dan kepercayaan terhadap kapasitas birokrasi negara. Pengalaman simbolik yang dibangun tidak lagi berpusat pada sosok individu, tetapi pada sistem pemerintahan yang mampu bekerja secara kolektif. Oleh karena itu, simbol presentasional pada ujaran ini menghasilkan representasi mengenai kepemimpinan yang kolaboratif, adaptif, dan berorientasi pada penguatan institusi.

Keterkaitan antara simbol diskursif dan simbol presentasional memperlihatkan bahwa gagasan mengenai pendelegasian diplomasi merupakan simbol yang merepresentasikan distribusi kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Simbol diskursif memberikan legitimasi rasional melalui argumentasi mengenai efektivitas pembagian tugas, sedangkan simbol presentasional membangun citra pemerintahan yang profesional dan berbasis kelembagaan. Perpaduan keduanya menghasilkan makna bahwa kekuasaan tidak selalu diwujudkan melalui kehadiran langsung seorang Presiden, tetapi juga melalui kemampuan membangun koordinasi dan kepercayaan terhadap institusi negara. Dalam perspektif semiotika Susanne Langer, proses simbolisasi tersebut menunjukkan bahwa bahasa politik tidak hanya menyampaikan usulan kebijakan, tetapi juga membentuk pengalaman kolektif mengenai bagaimana kekuasaan seharusnya dijalankan (Langer, 1942; 1953). Temuan pada keempat ujaran menunjukkan pola yang konsisten, yaitu setiap kritik Dino Patti Djalal selalu memadukan simbol diskursif yang berlandaskan argumentasi logis dengan simbol presentasional yang membentuk persepsi publik mengenai kepemimpinan, efisiensi, dan legitimasi kekuasaan. Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, pembahasan selanjutnya diarahkan pada sintesis mengenai bahasa kritik sebagai sistem simbol kekuasaan dalam perspektif semiotika Susanne Langer.

Hasil analisis menunjukkan bahwa keempat ujaran Dino Patti Djalal membentuk satu sistem simbol yang utuh dalam merepresentasikan kritik terhadap praktik diplomasi pemerintahan. Setiap ujaran memadukan simbol diskursif yang disusun melalui argumentasi logis dengan simbol presentasional yang membangun pengalaman dan persepsi publik mengenai kepemimpinan, efisiensi, serta akuntabilitas kekuasaan. Simbol diskursif tampak melalui penggunaan data empiris, argumentasi ekonomi, penyusunan alternatif kebijakan, dan gagasan distribusi kewenangan yang membentuk kritik secara rasional (Langer, 1942). Sementara itu, simbol presentasional menghadirkan citra mengenai kepemimpinan yang bertanggung jawab, strategis, profesional, dan berorientasi pada kepentingan publik melalui pengalaman simbolik yang dibangun oleh pilihan bahasa (Langer, 1953). Temuan tersebut memperlihatkan bahwa makna kritik politik tidak hanya ditentukan oleh isi informasi yang disampaikan, tetapi juga oleh kemampuan bahasa membentuk representasi sosial mengenai bagaimana kekuasaan seharusnya dijalankan. Dengan demikian, bahasa kritik berfungsi sebagai instrumen simbolik yang menghubungkan fakta, pengalaman, dan nilai ke dalam satu kesatuan makna politik.

Penelitian ini menegaskan bahwa teori semiotika Susanne Langer mampu menjelaskan bahasa politik sebagai proses simbolisasi yang melibatkan dimensi rasional sekaligus pengalaman simbolik. Kritik Dino Patti Djalal tidak hanya berfungsi mengevaluasi intensitas lawatan luar negeri Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga membangun standar normatif mengenai efisiensi diplomasi, akuntabilitas penggunaan anggaran, optimalisasi strategi hubungan internasional, dan distribusi kewenangan dalam pemerintahan. Temuan ini memperluas penerapan teori Langer yang selama ini lebih banyak digunakan dalam kajian seni dan budaya ke dalam analisis komunikasi politik kontemporer. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa simbol diskursif dan simbol presentasional bukan merupakan dua unsur yang berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi dalam membentuk persepsi publik terhadap legitimasi kekuasaan. Oleh karena itu, bahasa politik dapat dipahami sebagai ruang simbolik yang tidak hanya merefleksikan realitas politik, tetapi juga secara aktif membentuk cara masyarakat memaknai praktik kekuasaan. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi pengembangan kajian semiotika politik, khususnya dalam menganalisis simbol-simbol yang berkembang pada komunikasi politik di media digital.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa bahasa kritik Dino Patti Djalal terhadap intensitas lawatan luar negeri Presiden Prabowo Subianto merupakan sistem simbol yang memadukan dimensi diskursif dan presentasional sebagaimana dikemukakan dalam teori semiotika Susanne Langer. Simbol diskursif tampak melalui penggunaan data empiris, argumentasi ekonomi, penyajian frekuensi kunjungan, serta usulan alternatif diplomasi yang disusun secara logis dan sistematis sehingga membentuk kritik yang

dapat dipahami secara rasional. Di sisi lain, simbol presentasional hadir melalui pembentukan citra mengenai efisiensi, akuntabilitas, prioritas kepemimpinan, dan profesionalisme pemerintahan yang memengaruhi pengalaman serta persepsi publik terhadap praktik kekuasaan. Kedua bentuk simbol tersebut tidak bekerja secara terpisah, melainkan saling melengkapi dalam membangun makna politik dan memperkuat daya persuasi kritik yang disampaikan. Dengan demikian, bahasa kritik tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian informasi, tetapi juga sebagai instrumen simbolik yang membentuk cara masyarakat memahami legitimasi, tanggung jawab, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Hasil penelitian juga menegaskan bahwa teori semiotika Susanne Langer memiliki relevansi yang kuat dalam menganalisis komunikasi politik kontemporer, khususnya dalam mengungkap hubungan antara bahasa, simbol, dan kekuasaan. Penerapan konsep simbol diskursif dan simbol presentasional memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana data empiris, strategi retorika, dan pengalaman simbolik dipadukan untuk membangun persepsi publik terhadap suatu kebijakan maupun figur politik. Temuan ini memperluas penerapan teori Langer yang selama ini lebih banyak digunakan dalam kajian seni dan estetika ke dalam ranah komunikasi politik di Indonesia. Secara praktis, penelitian ini menunjukkan bahwa kritik politik yang efektif memerlukan keseimbangan antara argumentasi yang dapat diverifikasi dan pembentukan pengalaman simbolik yang mampu diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, kajian semiotika memberikan kontribusi penting dalam memahami bahwa bahasa politik tidak sekadar merepresentasikan realitas, tetapi juga secara aktif mengonstruksi makna dan legitimasi kekuasaan di ruang publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, Sultan. (2026). *Prabowo Puzzled by Criticism of His Frequent Overseas Trips*. Tempo.com. Diakses dari: <https://en.tempo.co/read/2107856/prabowo-puzzled-by-criticism-of-his-frequent-overseas-trips>
- Aminuddin, M., Suryaman, M., & Efendi, A. (2025). Representasi Ideologi dan Kekuasaan dalam Pidato Presiden Prabowo: Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough: Representation of Ideology And Power In President Prabowo's Speech: A Critical Discourse Analysis by Norman Fairclough. *Widyaparwa*, 53(2), 194-211. <https://doi.org/10.26499/wdprw.v53i2.2264>
- Annur, M. F., Syobah, S. N., & Muadin, A. (2025). Analisis Wacana Kritis atas Ideologi, Kekuasaan, dan Legitimasi Politik dalam Pemberitaan Pembangunan Ibu Kota Nusantara. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(7), 4904-4915. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i7.8919>
- Aulia, F. H., & Sakinah, M. (2025). Identification and Typology of Political Signs in Indonesia: A Semiotic Approach to Political Communication. *Lililacs Journal*, 5(1). <https://doi.org/10.21009/lililacs.051.01>
- Eliya, I., Lida, U. M., Nurpadillah, V., Taufiqurrahman, M., & Ranti, W. (2026). Konstruksi Wacana Kekerasan Simbolik terhadap Politikus Perempuan Indonesia di Media Sosial. *INDONESIA: Jurnal Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia*, 7(2). <https://doi.org/10.59562/indonesia.v7i2.84581>
- Gautama, Mohammad Isa. (2026). *Kritik Dino, Respons Teddy, dan Problem Komunikasi Kekuasaan*. Kompas. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2026/06/04/13450031/kritik-dino-respons-teddy-dan-problem-komunikasi-kekuasaan?page=all>
- Harmoko, D. D., & Purwaningrum, P. W. (2025). Simbolisme Politik dan Narasi Keberlanjutan: Studi Analisis Wacana Kritis Pidato Presiden RI Ke 7 Joko Widodo. *Jurnalistrendi: Jurnal Linguistik, Sastra, dan Pendidikan*, 10(1), 54-66. <https://doi.org/10.51673/jurnalistrendi.v10i1.2415>
- Kasman, N., Hanafi, M. H. M., Aswadi, A., & Kasman, R. (2026). Bahasa dan Politik dalam Wacana Global: Analisis Kritis Terhadap Framing, Retorika, dan Kekuasaan. *Kongres Internasional Masyarakat Linguistik Indonesia*, 2025. <https://doi.org/10.51817/kimli.v2025i.172>
- Kurniawati, W., Ekoyanantiasih, R., Yulianti, S., Hardaniawati, M., Sasangka, S. W., & Firdaus, W. (2022). Kekuasaan Semantik dalam Analisis Wacana Kritis Debat Capres-Cawapres. *Ranah: Jurnal Kajian Bahasa*, 11(1), 165-179. <https://doi.org/10.26499/rnh.v11i1.4966>
- Langer, S. K. (1942). *Philosophy in a New Key: A Study in the Symbolism of Reason, Rite and Art*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Langer, S. K. (1953). *Feeling and Form: A Theory of Art*. New York: Charles Scribner's Sons.

- Mawangi, Genta Tenri. (2026). *Tanggapi Kritik Dino, Seskab: Masukan Diterima, Jangan Kaburkan Fakta*. Antara News. Diakses dari: <https://www.google.com/amp/s/m.antaranews.com/amp/berita/5589976/tanggapi-kritik-dino-seskab-masukan-diterima-jangan-kaburkan-fakta>
- Nurhadi, M. F., & Utami, S. P. T. (2026). Representasi Kekuasaan Dalam Wacana Politik: Analisis Wacana Kritis Wawancara Presiden Prabowo di Kompas. Com. Bahtera Indonesia. *Jurnal Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia*, 11(1), 211-229. <https://doi.org/10.31943/bi.v11i1.1370>
- Post, The Jakarta. (2026). *Analysis: Costly Diplomacy: Prabowo's Overseas Trips Under Scrutiny*. The Jakarta Post. Diakses dari: <https://www.thejakartapost.com/opinion/2026/06/09/analysis-costly-diplomacy-prabowos-overseas-trips-under-scrutiny>
- Rozak Riaji, I. A., Zaelani, A., & Taharas, R. F. (2026). Eufemisme dalam Bahasa Politik Indonesia: Kajian Konseptual. *Jurnal Dialektika Politik*, 10(1), 23–33. <https://doi.org/10.37949/jdp.v10i1.257>
- Setiawan, A. (2025, October). Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Pemerintahan Prabowo Subianto: Dari Pragmatisme Ekonomi menuju Strategic Assertiveness dalam Tatanan Multipolar (2024-2025). *In Prosiding Seminar Nasional Penelitian LPPM UMJ*. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaslit/article/view/29150>
- Siahaan, A., Afriyanti, A. A., Nainggolan, E. M., Dewi, E. R., Siallagan, L., Rianti, R., & Capah, Y. S. (2023). Bahasa dan Kekuasaan dalam Wacana Politik: Analisis Wacana Historis Ruth Wodak Terhadap Pidato Presiden Joko Widodo. *Enggang: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya*, 4(1), 557-569. <https://doi.org/10.37304/enggang.v4i1.12105>
- Sitorus, R. Y., Tarigan, R. A. B., Nahampun, D. Y., & Hutasoit, F. Y. N. (2025). Praktik Kekuasaan: Studi Analisis Wacana Terhadap Pidato Megawati Soekarno Putri. *CARONG: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 2(2), 765-775. <https://doi.org/10.62710/86a1xr82>
- Sobuir, A. (2006). *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotika, dan Analisis Framing*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sukrin, S. (2025). Bahasa sebagai Alat Kekuasaan: Telaah Kontekstual dalam Analisis Wacana Kritis. *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, 9(2), 471-482. <https://doi.org/10.52266/tajdid.v9i2.5855>